

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dilihat secara statistik kependudukan, Indonesia menduduki peringkat ke-4 yang memiliki jumlah populasi manusia terbanyak dengan 255,993,674 jiwa setelah Cina, India dan Amerika (Savitri, 2024). Setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dan tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita masih termasuk tinggi. Upaya untuk mengontrol populasi penduduk di Indonesia ialah dengan program Keluarga Berencana.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara mengatur usia perkawinan, jarak kehamilan, serta jumlah anak ideal dalam suatu keluarga (Muaya et al., 2023). Program KB ini sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional karena dampaknya bisa kepada kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Secara praktiknya Keluarga Berencana (KB) memiliki arti untuk mengatur jumlah anak sesuai kehendak dan menentukan sendiri kapan akan hamil, serta bisa menggunakan metode Keluarga Berencana (KB) yang sesuai dengan keinginan dan kecocokan kondisi tubuh (Garmana et al., 2023).

Pada awalnya program KB digalakkan di era Presiden Soeharto sebagaimana yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Pasal 16 (Azizah et al., 2023). Pada saat itu pegawai negeri hanya diberi tunjangan untuk maksimal tiga anak saja, sehingga program ini relatif berhasil. Setelah terjadinya reformasi dan pergantian pemerintahan, program KB ini justru terlihat

tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah. Implementasi program KB pasca reformasi hingga sekarang belum mampu secara optimal mengendalikan jumlah angka kelahiran. Pada sisi lain, implementasi program KB ini diharapkan mampu menunjang kesejahteraan masyarakat melalui program yang ada didalamnya (Ariana & Sukraaliawan, 2022)

Desa La'Aya, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara menarik untuk diteliti karena menolak program KB demi mempertahankan bantuan PKH dan tetap berada dalam kategori menengah ke bawah. Pemerintah setempat mengklasifikasikan kesejahteraan keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, dan kesehatan (Qoyyimah & Wahini, 2016). Untuk lebih menjelaskan pentingnya program KB di Desa La'Aya maka peneliti akan memaparkan jumlah penduduk Desa La'Aya tiap 2 tahun dari 2020 sampai tahun 2024 sebagai mana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa La'Aya Kecamatan Tuhemberua

Jenis Kelamin	Tahun		
	2020	2022	2024
Laki-Laki	132	159	170
Perempuan	138	167	185
Total	270	326	355

Sumber : Kecamatan Tuhemberua dalam Angka, 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa La'Aya, terjadi peningkatan dari 270 jiwa pada tahun 2020 menjadi 326 jiwa pada tahun 2022, dan selanjutnya menjadi 355 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduk dalam periode 2020-2022 mencapai 20,74%, sementara dalam periode 2022-2024 sebesar 8,90%. Secara keseluruhan, dari 2020 hingga 2024, pertumbuhan penduduk mencapai 31,48%.

Laju pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya peningkatan angka kelahiran, yang dapat dikaitkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB. Sikap masyarakat yang menolak program KB untuk tetap memenuhi

syarat bantuan PKH dapat berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan menurunnya kesejahteraan keluarga. Jika tren ini terus berlanjut tanpa pengendalian, dikhawatirkan akan semakin membebani sumber daya ekonomi dan sosial di Desa La'Aya.

Terkait permasalahan-permasalahan terjadi pada saat pelaksanaan program KB, peneliti melihat fenomena yang terjadi pada pelaksanaan program KB mengarah pada indikator-indikator kesejahteraan yang disebutkan bisa mewakili masalah yang terjadi dalam penganalisisan pada penelitian ini. Penduduk di Desa La'Aya Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara memiliki alasan tersendiri dalam menolak program Keluarga Berencana (KB), yaitu demi mempertahankan status sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil wawancara awal dengan salah seorang warga La'Aya bernama Ina Wilda Zega (APRIDA) Menungkapkan bahwa dengan tidak menggunakan KB dan tetap memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih banyak, status mereka sebagai keluarga prasejahtera akan tetap terjaga, sehingga mereka dapat terus menerima bantuan PKH yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wawancara awal, 08 Januari 2025).

Terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program KB, peneliti melihat fenomena bahwa ketika pemerintah mengharapakan program KB dapat membawa kesejahteraan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup, justru masyarakat di Desa La'Aya memandang sebaliknya. Mereka memilih untuk menolak KB agar tetap berada dalam garis kemiskinan demi mempertahankan status sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dianggap sebagai solusi utama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sebagaimana salah satu syarat keluarga yang mendapatkan

PKH ialah memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (Wayuni et al., 2021).

Program Keluarga Berencana (KB) yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya fenomena unik, seperti yang terjadi di Desa La'Aya Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara, di mana masyarakat justru menolak program KB dengan alasan mempertahankan status prasejahtera demi memenuhi syarat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini mencerminkan adanya kontradiksi antara tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui KB dan persepsi masyarakat tentang kesejahteraan yang lebih terfokus pada bantuan langsung seperti PKH.

Menolak KB di Desa La'Aya dapat diartikan sebagai strategi masyarakat untuk tetap memenuhi syarat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu kriteria utama penerima PKH adalah memiliki anak balita atau anak usia tertentu yang masih dalam pendidikan dasar, sehingga memiliki lebih banyak anak dianggap memberikan peluang lebih besar untuk memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, menolak KB menjadi cara mereka untuk mempertahankan status sebagai keluarga penerima PKH, meskipun hal ini berarti memilih untuk tetap berada dalam kategori keluarga prasejahtera (Observasi awal, 15 Januari 2025).

Selain faktor mendapatkan KB di atas juga ada faktor budaya dimana setiap keluarga menginginkan adanya keturunan laki-laki. Di banyak komunitas, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa La'Aya, anak laki-laki dianggap memiliki peran penting dalam keluarga, misalnya sebagai penerus garis keturunan,

penjaga nama keluarga, atau sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di masa depan. Tekanan sosial dan harapan dari lingkungan sekitar sering kali memengaruhi keputusan keluarga untuk terus memiliki anak hingga keinginan memiliki keturunan laki-laki terpenuhi. Dalam konteks ini, KB dianggap sebagai hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Akibatnya, mereka cenderung menolak penggunaan KB agar dapat memiliki lebih banyak anak dengan harapan salah satunya adalah laki-laki. Hal ini menjadi alasan tambahan selain faktor ekonomi terkait dengan penerimaan bantuan PKH.

Penolakan terhadap KB tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, seperti keinginan memiliki keturunan laki-laki yang dianggap penting dalam menjaga garis keturunan dan peran sosial keluarga. Kondisi ini menimbulkan permasalahan struktural, di mana program yang seharusnya membantu masyarakat mencapai kesejahteraan malah diabaikan karena adanya orientasi berbeda terhadap sumber kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang menentukan keputusan program Keluarga Berencana (KB) di Desa La'Aya Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dinamika persepsi masyarakat terhadap program KB dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka. Dengan mengeksplorasi hubungan antara kesejahteraan, budaya, dan partisipasi dalam program KB, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam merancang program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sehingga tujuan kesejahteraan nasional dapat tercapai tanpa mengabaikan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menentukan keputusan keluarga terhadap program keluarga berencana ?
2. Mengapa program bantuan sosial mempengaruhi keputusan masyarakat terhadap program keluarga berencana ?
3. Bagaimana faktor budaya berkontribusi pada keputusan masyarakat terhadap program keluarga berencana ?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada faktor yang menentukan keputusan keluarga terhadap program keluarga berencana baik faktor sosial maupun factor ekonomi. Penelitian ini juga akan berfokus pada pengaruh program bantuan sosial, khususnya PKH, terhadap keputusan masyarakat terhadap program keluarga berencana. Selanjutnya mengidentifikasi peran faktor budaya dalam mempengaruhi keputusan masyarakat terhadap program KB.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menentukan keputusan keluarga terhadap program keluarga berencana.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh program bantuan sosial terhadap keputusan program keluarga Berencana.
3. Untuk menganalisis faktor budaya berkontribusi pada keputusan keluarga terhadap program keluarga Berencana.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur mengenai hubungan antara program bantuan sosial dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya dalam konteks daerah pedesaan dengan nilai-nilai budaya yang kuat. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi Sosiologi Keluarga, Sosiologi Kesehatan dan Sistem Sosial Budaya Masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang dinamika sosial-ekonomi dan budaya dalam penerimaan atau penolakan program pemerintah, sehingga dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktis

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) tanpa mengorbankan akses mereka terhadap bantuan sosial seperti PKH. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah mengintegrasikan program kesejahteraan dengan pendekatan budaya lokal untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.

2. Bagi Warga Desa La'Aya

Penelitian ini memberikan wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya program KB dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian juga diharapkan dapat membuka peluang diskusi antara warga dan pemerintah terkait pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.